

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang perlu bekerja, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini tentu saja merupakan hal yang lumrah jika dilihat dari pemenuhan kebutuhan primer atau dasar manusia yang jumlahnya semakin banyak dan beragam, terbukti dari data tingkat negara bagian, nasional, regional, dan provinsi. Adanya lowongan kerja tampaknya menjadi daya tarik terbesar dalam dunia kerja, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun juga pemenuhan hak-hak orang yang terdiskriminasi, seperti penyandang disabilitas, pada semua profesi.

Difabel, atau disabilitas, merupakan kelompok masyarakat yang seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mencari peluang usaha dan kesempatan berkontribusi secara ekonomi. Dalam keberagaman ini, para disabilitas muncul sebagai bagian integral dari masyarakat. Mereka lahir dengan kondisi fisik, kognitif, atau sensorik yang berbeda dari mayoritas, namun hal ini seharusnya tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menikmati hak-hak yang sama dengan individu lainnya (Murtie, 2016). Hidup dengan kekurangan atau kelebihan tidak seharusnya menjadi alasan untuk merampas hak-hak dasar dan menjadi pembatas dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kesamaan hak tersebut terdapat pada filsafat Negara Pancasila dan Undang-Undang 1945 (Aesah et al., 2020). Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2, dinyatakan bahwa:

“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Selain itu, peraturan pemerintah yang mengatur penyandang disabilitas di tempat kerja, seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah untuk menerima 2% dari jumlah seluruh pegawai atau pekerja pada instansi tersebut dan 1% dari jumlah keseluruhan pegawai. jumlah pegawai di instansi swasta. Namun nyatanya kuota 2% untuk instansi pemerintah dan 1% untuk instansi komersial tidak terpenuhi dan tidak berjalan efisien (Sya'diyah, 2020). Dengan demikian, akses terhadap kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih terbatas dan belum memenuhi harapan semua kalangan, padahal keterlibatan penyandang disabilitas di sektor publik dan swasta menjadi salah satu harapan. Agar penyandang disabilitas dapat bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak dan cukup. Keterlibatan aktif difabel dalam dunia kerja tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu difabel tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia menjadi kunci utama dalam membuka peluang kerja inklusif, di mana difabel memiliki tempat yang setara dan berkontribusi

dalam memperkuat perekonomian nasional. Sektor ini memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendukung distribusi pendapatan. Salah satu bentuk dukungan yang semakin mendapatkan perhatian adalah pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah difabel. Pemberdayaan Unit Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi difabel memiliki implikasi yang mendalam dalam menciptakan inklusi sosial dan ekonomi yang seimbang. Difabel, sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat, memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam kehidupan ekonomi, serta mendapatkan peluang untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM sebagai wadah ekonomi lokal menjadi kunci utama dalam mewujudkan hak-hak tersebut.

Difabel Blora Mustika (DBM) Blora merupakan salah satu hasil dari pemberdayaan UMKM yang terdapat di Kabupaten Blora. Difabel Blora Mustika (DBM) merupakan organisasi dan komunitas yang fokus pada advokasi dan perjuangan untuk pemenuhan hak-hak serta perlindungan penyandang disabilitas di Kabupaten Blora. Anggota Difabel Blora Mustika (DBM) seperti tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, tuna netra, tuna mental, Autis, Polio, amputasi kaki dan tangan, orang yang mengalami kusta, dan lainnya. Difabel Blora Mustika (DBM) sebelumnya dikenal sebagai FKPD-BM (Forum Komunikasi Penyandang Disabilitas Blora Mustika), forum ini dibentuk pada tanggal 3 Desember 2011 dengan penuh tantangan, yang memiliki anggota sebanyak 15 orang. Melalui tekad yang kuat dan

perjuangan gigih, FKPD-BM berhasil mendirikan lembaga ini dan berganti menjadi Difabel Blora Mustika, yang merupakan nama resmi hingga pada saat ini. Tujuan utama adanya Difabel Blora Mustika adalah untuk melaksanakan pendataan dan kajian sosial ekonomi difabel di Kabupaten Blora, serta menggelar kampanye dan advokasi untuk mencapai kesetaraan hak dan peluang bagi anggotanya, khususnya difabel di Blora secara keseluruhan.

Tujuan dari organisasi Difabel Blora Mustika (DBM) adalah menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan pemerintah atau pihak lain guna mencapai kesetaraan peluang di dalam semua aspek kehidupan bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah mencakup penyediaan berbagai fasilitas dan dukungan untuk membantu difabel. Difabel Blora Mustika (DBM) berkomitmen untuk memberdayakan anggotanya melalui berbagai program kegiatan, antara lain pelatihan, perusahaan produktif, simpan pinjam, koperasi, dan lain-lain. Membuat batik tulis dengan motif bervariasi yang dibuat berdasarkan orisinalitas ide sendiri merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

Lembaga organisasi Difabel Blora Mustika muncul sebagai agen perubahan yang memantapkan pemahaman bahwa disabilitas bukanlah sebuah aib bagi keluarga. Dengan berfokus pada pembuatan batik, lembaga ini tidak hanya menjadi wadah untuk mengembangkan keterampilan seni, tetapi juga menciptakan ruang inklusif di mana penyandang disabilitas dapat

tampil sebagai kontributor berharga dalam kegiatan ekonomi dan seni. Melalui karya-karya batik yang dihasilkan, lembaga ini juga memberikan apresiasi terhadap kreativitas penyandang disabilitas, yang membuktikan bahwa keunikan setiap individu tanpa terkecuali dapat menjadi bagian berharga dari budaya dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Difabel Blora Mustika bukan hanya sekadar lembaga seni, tetapi juga representasi nyata dari perubahan paradigma masyarakat yang semakin menerima dan menghargai keberagaman, merangkul disabilitas sebagai bagian yang terintegrasi secara keseluruhan. Kepiawaian dan semangat para anggota Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) dalam membuat batik mendapat apresiasi yang tinggi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Para anggota komunitas ini, yang dengan penuh dedikasi dan keahlian menciptakan karya-karya batik yang menakjubkan, telah menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi mereka untuk berprestasi. Apresiasi dari Gubernur tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kualitas dan keindahan batik yang dihasilkan, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap ketekunan, kreativitas, dan semangat juang para penyandang disabilitas dalam mengembangkan potensi diri mereka. Dukungan ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi anggota DBM untuk terus berkarya dan berinovasi, serta menginspirasi masyarakat luas untuk lebih menghargai dan mendukung produk-produk UMKM lokal, khususnya yang dikerjakan oleh para difabel.

Keberadaan Difabel Bloro Mustika (DBM) di Kabupaten Bloro sebagai lembaga yang mampu merubah persepsi terhadap disabilitas menjadi sebuah kekuatan dan potensi, menjadi titik awal yang menarik bagi peneliti untuk mendalami dampak pemberdayaan UMKM terhadap penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran penyandang disabilitas dan kontribusi UMKM dalam pemberdayaan difabel, khususnya di Difabel Bloro Mustika (DBM) Kabupaten Bloro. Disabilitas merupakan sebuah kondisi yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari seseorang dan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, baik fisik maupun sosial. Di tengah keberagaman kondisi disabilitas, penyandang disabilitas diharapkan dapat berperan aktif dalam masyarakat, termasuk dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pada era globalisasi ini, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Di Kabupaten Bloro, terdapat kelompok UMKM difabel yang berusaha untuk berkembang dan memberikan kontribusi pada perekonomian lokal. Namun, tantangan yang dihadapi oleh UMKM difabel ini tidak dapat diabaikan, terutama dalam aspek penguatan usaha dan akses pasar. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan serta penguatan kepada UMKM agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola serta meningkatkan potensi UMKM agar dapat bersaing secara

signifikan. Pada konteks ini, penelitian ini akan membahas peran yang dimainkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM dalam penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan fokus pada studi kasus UMKM Difabel Blora Mustika di Blora.

Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga sebagai penyokong ekonomi lokal. Namun, UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses pasar, modal, dan pengetahuan. Oleh karena itu, peran Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM sangat krusial dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh UMKM untuk dapat bertahan dan berkembang.

Studi ini akan mengambil contoh pada UMKM Difabel Blora Mustika, yang menjadi representasi nyata dari upaya pemberdayaan UMKM, khususnya yang dikelola oleh penyandang disabilitas. Dengan mengeksplorasi berbagai kebijakan, program, dan dukungan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana peran pemerintah daerah dapat berdampak positif terhadap penguatan UMKM, terutama yang dikelola oleh difabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana peran Dinas Perdagangan, Koperasi, dan

UMKM Kabupaten Blora dalam pemberdayaan usaha UMKM Difabel Blora Mustika.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora melaksanakan perannya, terutama yang melibatkan kelompok difabel, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang perlu dijawab untuk memahami secara lebih mendalam peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam penguatan UMKM di Kabupaten Blora, khususnya UMKM Difabel Blora Mustika pada tahun 2022-2023. Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora dalam meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui UMKM Difabel Blora Mustika?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan penyandang disabilitas melalui UMKM Difabel Blora Mustika?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bora dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui UMKM Difabel Bora Mustika.
2. Untuk mendeskripsikan tantangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bora dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan penyandang disabilitas melalui UMKM Difabel Bora Mustika.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap literatur mengenai pemberdayaan UMKM difabel dan peran instansi pemerintah dalam konteks tersebut. Temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, dan praktisi yang tertarik dalam memahami dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penguatan UMKM difabel.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bora mengenai kontribusinya dalam mendukung UMKM Difabel Bora Mustika. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan program yang ada, sehingga mampu

memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pengembangan UMKM difabel.

### E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bahan yang penulis gunakan untuk menyusun penelitian ini, dan untuk menghindari terulangnya kembali, penulis memberikan banyak referensi. Untuk meminimalisir duplikasi atau pengulangan penulisan, penulis menambahkan tinjauan pustaka, yang terdiri dari beberapa skripsi, buku, manuskrip, dan jurnal yang terkait dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan. Beberapa publikasi yang penulis temukan antara lain sebagai berikut:

No.	Sumber	Tahun	Judul	Nama Penulis	Hasil Penelitian
1.	Jurnal Universitas 17 Agustus Surabaya <a href="https://conferen.ce.untag-sby.ac.id/index.php/snhs/article/view/1043/50">https://conferen.ce.untag-sby.ac.id/index.php/snhs/article/view/1043/50</a>	(2022)	Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus UMKM Sandal dan Sepatu Wedoro)	Erlisa Nur Arofah, Endang Indartuti dan Supri Hartono	Jurnal ini membahas pentingnya memajukan sistem perekonomian masyarakat, terutama usaha rumahan atau UMKM, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, khususnya UMKM sandal dan sepatu Wedoro yang sedang mengalami krisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi telah berperan baik dalam mengembangkan UMKM ini. Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro sebagai katalis dinilai sangat ideal, terutama sebagai lembaga pemasaran atau pengenalan UMKM. Namun, fungsi Dinas sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan pelatihan dinilai belum optimal. (Arofah et al., 2022).
2.	Skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta	(2016)	Peran Badan Sosial Mardiwuto dalam Pemberdayaan Difabel Netra di Yogyakarta	Wuri Solikhatun	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa penerimaan penyandang disabilitas di tempat kerja tidaklah sepositif yang diharapkan. Penelitian kualitatif ini dilakukan di Dinas Sosial Mardi Wuto, sebuah organisasi pengembangan masyarakat di Yogyakarta. Dinas ini berperan penting dalam pemberdayaan penyandang tunanetra melalui fungsi fasilitatif dan instruktif, seperti pelatihan kuliner dan pijat. Dampaknya, penyandang disabilitas netra dapat memenuhi kebutuhan dasar,

					meningkatkan kemampuan intelektual dan pendapatan, serta berkontribusi dalam pembangunan lingkungan. Pemberdayaan ini juga menciptakan citra positif di masyarakat dan membangun saling ketergantungan. (Solikhatus, 2016).
3.	Jurnal Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleks/ekutif/article/view/26258/25885">https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleks/ekutif/article/view/26258/25885</a>	(2019)	Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas	Theresia Baturangka J.E Kaawoan Frans Singkoh	Temuan penelitian menunjukkan beberapa hal: Pertama, peran fasilitatif Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas telah dilaksanakan sesuai program, namun terbatas pada pemberian paket bantuan sosial. Kedua, workshop selama tiga hari mengenai peran pendidikan, pelatihan, dan pengembangan mental telah dilaksanakan, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah kota Manado. Edukasi yang diberikan memadai tetapi belum optimal karena tidak ada pemantauan atau bimbingan lanjutan. Ketiga, fungsi teknis Dinas Sosial dalam mengumpulkan statistik disabilitas masih kurang sempurna, karena data yang ada belum mutakhir, yang berpotensi mempengaruhi pemerataan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Manado. (Baturangka et al., 2019).
4.	DERIVATIV: Jurnal Manajemen <a href="https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/view/509/360">https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/view/509/360</a>	(2020)	Pemberdayaan Difabel Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat	Siti Aesah Yhonanda Harsono Derizka Inva Jaswita	Berdasarkan hasil penelitian, Program Pemberdayaan Disabilitas Dinsos Nusa Tenggara Barat terhadap penyandang disabilitas berjalan dengan baik. Program tersebut mencakup pelatihan memasak bagi penyandang tuna rungu yang ingin mendirikan usaha makanan, keterampilan menjahit, bengkel untuk penyandang disabilitas yang ingin memulai usaha bengkel, serta pelatihan elektronika, pijat, dan sablon. Pemerintah memberikan modal, sementara pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Sosial. Namun, terdapat kekurangan dalam pelatihan, di mana penyandang disabilitas masih kurang terampil dan memerlukan arahan lebih lanjut hingga pelatihan selesai. (Aesah et al., 2020).
5.	Patria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat <a href="https://journal.unika.ac.id/index.php/patria/article/view/2298/pdf">https://journal.unika.ac.id/index.php/patria/article/view/2298/pdf</a>	(2021)	Pemberdayaan Kewirausahaan Berbasis Teknologi Informasi Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Gunung Kidul	Halim Budi Santoso Argo Wibowo Jong Jek Siang Rosa Delima Antonius Rachmat Chrismanto	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif setelah mengikuti pelatihan. Peserta pelatihan meningkatkan kemampuan mereka untuk berjualan secara online, dengan aktivitas halaman Facebook sebagai metrik yang diakui. Pengetahuan peserta pelatihan diharapkan dapat mempengaruhi potensi kewirausahaan anggota Mitra Sejahtera penyandang disabilitas. (Santoso et al., 2021)
6.	Jurnal Administrasi Publik (JAP)	(2013)	Peranan Dinas Koperasi dan UMK dalam Pemberdayaan	Hesti Kusuma Wardani	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan belum ideal dan merata karena data jumlah UKM belum valid dengan variabel

	<a href="http://administrasipublik.studentjournal.uob.ac.id/index.php/jap/article/">http://administrasipublik.studentjournal.uob.ac.id/index.php/jap/article/</a>		Usaha Kecil Menengah Kota Malang	Ambar Pertiwi Abdul Juli Andi Gani Abdullah Said	pendukung dan penghambatnya. Ide yang dibuat adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang mengumpulkan statistik seluruh UKM yang ada di Malang. (Pertiwi et al., 2013).
7.	eJournal Ilmu Administrasi Negara <a href="https://ejournal.ap.fisip.unmul.ac.id/site/?p=2468">https://ejournal.ap.fisip.unmul.ac.id/site/?p=2468</a>	(2017)	Peran Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda	Dwi Sepriyono Nur	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM di Kota Samarinda mengembangkan iklim usaha dengan memberikan kemudahan perizinan, dukungan, dan regulasi yang kuat. Upaya ini meningkatkan jumlah UKM, mendorong pertumbuhan unit bisnis baru, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan promosi produk. Selain itu, bantuan keuangan dari perbankan dan dukungan dari asosiasi UKM turut berkontribusi dalam pemberdayaan UKM di Kota Samarinda. (Nur, 2017).
8.	Institut Pemerintahan Dalam Negeri <a href="http://eprints.ipdn.ac.id/16052/1/Repository%20Josua%20Sinambela.pdf">http://eprints.ipdn.ac.id/16052/1/Repository%20Josua%20Sinambela.pdf</a>	(2023)	Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	Joshua Sinambela	Penelitian ini menemukan bahwa koperasi dan Dinas UMKM berperan signifikan dalam penguatan perekonomian masyarakat di Kota Medan. Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, serta kerjasama lintas sektor, telah mendukung program dan strategi peningkatan ekonomi. Dinas Koperasi dan UMKM perlu meningkatkan akses pembiayaan bagi pemilik usaha melalui program pinjaman berbunga rendah atau bantuan keuangan lainnya. Selain itu, peningkatan pembiayaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui kerjasama antar sektor diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha. Dinas juga perlu menentukan arah kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan Koperasi dan UMKM, serta melakukan evaluasi terhadap program-program sebelumnya. (Sinambela, 2023).
9.	INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia <a href="https://inobis.org/ojs/index.php/jurnal-inobis/article/download/65/55/121">https://inobis.org/ojs/index.php/jurnal-inobis/article/download/65/55/121</a>	(2018)	Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global	Kristina Sedyastuti	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM telah membuktikan kemampuan mereka untuk bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama selama krisis. Namun, mereka juga menghadapi tantangan seperti kekurangan modal, sumber daya manusia, dan keahlian teknologi. Selain itu, UMKM harus mengatasi ketidakpastian prospek usaha dan perencanaan yang tidak stabil. Untuk meningkatkan daya saing, diperlukan pengetahuan pasar, akses permodalan, bantuan, dan pengembangan teknologi informasi, serta semangat kewirausahaan yang kuat. Kolaborasi antara pelaku komersial, pemerintah, dan lembaga keuangan sangat penting untuk mendukung UMKM (Sedyastuti, 2018).

10.	Judul Eksekutif <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/2548/8/25145">https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/2548/8/25145</a>	(2019)	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan Ukm)	Christofer Ondang Frans Singkoh Neni Kumayas	Kajian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan utama, seperti kurangnya keterlibatan pemerintah dalam penguatan UMKM, yang memaksa pelaku UMKM mencari dana dan instrumen sendiri. Permasalahan lain adalah pengelolaan yang kurang profesional akibat minimnya keahlian dan kualitas sumber daya manusia di UMKM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam meningkatkan produktivitas dan pemasaran dengan menggandeng pelaku usaha, namun promosi berbasis pameran yang dilakukan Pemkab tidak memberikan dampak langsung signifikan terhadap pendapatan pelaku usaha. Menurut pelaku UMKM, dorongan melalui seminar dan penyuluhan kewirausahaan serta sosialisasi yang dilakukan secara kolaboratif dengan pihak swasta dan Pemerintah Provinsi efektif dalam meningkatkan semangat berwirausaha dan jumlah wirausaha baru setiap tahunnya. (Ondang et al., 2019).
11.	UIN Walisongo <a href="https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12569/">https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12569/</a>	(2019)	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Keterampilan Handicraft oleh Komunitas Sahabat Difabel (KSD) Kota Semarang	Nurul Eka Wahyu Handayani	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan Komunitas Sahabat Disabilitas (KSD) Kota Semarang melalui keterampilan kerajinan tangan telah berjalan dengan baik, melalui tahapan pengajuan masalah, analisis masalah, penentuan tujuan dan sasaran, perencanaan tindakan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi akhir. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian lain yang juga fokus pada penyandang disabilitas dan pelatihan keterampilan kerajinan tangan. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pemberdayaan melalui keterampilan membuat dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data. (Handayani, 2019).
12.	Journal of Social Political Sciences <a href="http://e-journal.una.ac.id/index.php/jsps/article/view/16/15">http://e-journal.una.ac.id/index.php/jsps/article/view/16/15</a>	(2020)	Digital Literacy And Access To Technology In The Empowerment Program For Persons With Disabilities During The Covid-19 Pandemic: The Case Of Natural Dyes Batik Smes In Tarakan	Nonon Saribanon, Muhammad Abrar Putra Siregar dan Luthfi Kurniawan Joshi	Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas dan potensi akses digital bagi penyandang disabilitas, meningkatkan kualitas produk, kapasitas pengrajin batik pewarna alami, serta memperkuat kelembagaan kelompok pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Disabilitas Batik (Kubedistik) di Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan perlunya penekanan lebih besar pada strategi fasilitas untuk meningkatkan keterampilan, kognisi positif terkait pekerjaan, serta gaya komunikasi non-verbal dan paralinguistik yang sesuai. Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan

					penelitian sebelumnya; perbedaannya adalah fokus penelitian sebelumnya pada potensi akses teknologi digital, sedangkan penelitian ini menitikberatkan peran penyandang disabilitas dalam pemberdayaan UMKM.(Saribanon et al., 2020).
13.	Atlantis Press <a href="https://www.atlantis-press.com/proceedings/aic-mar-18/55913583">https://www.atlantis-press.com/proceedings/aic-mar-18/55913583</a>	(2019)	Economic Empowerment Model of People with Disability in the Creative Industries	Agung Pujiyanto Endro Tjahjono	Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model pemberdayaan penyandang disabilitas agar mereka memiliki kemandirian ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksplorasi dan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di industri kreatif dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan organisasi disabilitas. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam fokus pada penyandang disabilitas dan konteks ekonomi, namun berbeda dalam hal kajian yang lebih mendalam pada model pemberdayaan ekonomi di sektor industri kreatif. (Pujiyanto & Tjahjono, 2019).
14.	International Journal of Governance and Public Policy Analysis (IJGPPA) 2020 Research Centre for Governance and Public Policy University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka	(2020)	Participation of People with Disabilities in SMEs Development in Tanzania: Policy Review	Dr. Wilfred Uronu Lameck	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan UKM dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan di Tanzania menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menyoroti pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam pengembangan UKM sebagai pendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Keduanya meneliti tentang penyandang disabilitas dalam kegiatan pemberdayaan UKM. Namun, penelitian tersebut lebih fokus pada tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses lapangan kerja yang adil di UKM di Tanzania serta potensi strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. (Lameck, 2020).
15.	Journal of Applied Business and Economics <a href="https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/1391/1104">https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/1391/1104</a>	(2014)	Empowering Of Disabled Entrepreneurs Through Maximization Benefit Of Small Business Loan	Wening Estiningsih	Penelitian ini bertujuan menggambarkan pentingnya pemberdayaan pengusaha penyandang disabilitas melalui pemanfaatan pinjaman usaha kecil dan sebagai acuan pengembangan kebijakan terkait. Menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan pentingnya memudahkan akses pinjaman bagi pengusaha penyandang disabilitas sebagai sarana pemberdayaan dan menciptakan lingkungan inklusif. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam fokus pada penyandang disabilitas, namun berbeda dalam menyoroti tantangan yang dihadapi dan manfaat pinjaman usaha kecil. Pemberdayaan penyandang disabilitas

					melalui UKM diharapkan dapat mengembangkan perekonomian daerah, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. (Estiningsih, 2014)
16.	International Journal Of Creative Research Thoughts (IJCRT) <a href="https://ijcrt.org/papers/IJCRT2211539.pdf">https://ijcrt.org/papers/IJCRT2211539.pdf</a>	(2022)	A Study Of Entrepreneurship As A Source Of Livelihood Among A Study Of Entrepreneurship As A Source Of Livelihood Among People	Savita Rao dan Dr. Anju Kumar	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi kewirausahaan sebagai sarana penghidupan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pengusaha disabilitas di India, serta mencari solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan dapat menjadi alternatif yang viable untuk menjamin penghidupan mereka. Studi ini membandingkan temuan penulis dengan penelitian sebelumnya, yang sama-sama menyoroti pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kewirausahaan, tetapi fokusnya berbeda dalam mengeksplorasi potensi kewirausahaan sebagai solusi bagi mereka dalam mencari peluang penghidupan. (Rao & Kumar, 2022).
17.	International Forum Journal <a href="https://journals.aiaas.edu/info/article/view/57">https://journals.aiaas.edu/info/article/view/57</a>	(2018)	Empowering Persons with Disabilities Through Training and Employment: A Case Study	Donie Ver Medalla dan Bella Marie Medalla	Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja untuk mencapai inklusi sosial ekonomi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasilnya menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas guna meningkatkan kemandirian mereka. Studi ini juga menunjukkan bahwa wirausaha sosial, seperti "Handcrafted by Harl's" di Laguna, Filipina, merupakan cara yang etis untuk mengintegrasikan penyandang disabilitas dalam perekonomian, meskipun ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam pendekatan pemberdayaan yang diambil. (Medalla & Medalla, 2018)
18.	International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled <a href="https://www.ijcwed.com/wp-content/uploads/2017/06/IJCWED2_75.pdf">https://www.ijcwed.com/wp-content/uploads/2017/06/IJCWED2_75.pdf</a>	(2017)	The Prospects Of People With Disabilities (PWDs) Participation In Entrepreneurship: The Perspective Of University Students With Physical And Sensory Disabilities	Muhammad Nur Aizuddin Norafandi dan Nurazzura Mohamad Diah	Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan keyakinan partisipasi penyandang disabilitas dalam berwirausaha. Hasil penelitian ini adalah mengedepankan tiga tema utama: pemberdayaan, keamanan, dan eksklusivitas. Dari penelitian penulis dengan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan penyandang disabilitas melalui wirausaha. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya berfokus pada mahasiswa saja kemudian juga metode penelitian dan objek penelitian juga berbeda (Norafandi & Diah, 2017).

19.	International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)  <a href="https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2S9/B10670982S919.pdf">https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2S9/B10670982S919.pdf</a>	(2019)	The Role of Indonesian Disability Entrepreneurial Empowerment on Product Quality and its Impact on Community Trust	Agus Setyo Pranowo, Suryana, dan Disman	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh program pemberdayaan wirausaha disabilitas terhadap kepercayaan masyarakat melalui kualitas produk. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Dari penelitian penulis dengan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang penyandang disabilitas. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana kualitas produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas. Kemudian perbedaan juga terletak pada objek penelitian dan metode penelitiannya (Pranowo et al., 2019).
20.	International Journal of Research in Business Studies and Management	(2016)	A Qualitative Study on the Challenges Faced by Entrepreneurs Living with Physical Disabilities within the Sebokeng Township of South Africa	Eugine Tafadzwa Maziriri dan Nkosivile Welcome Madinga	Penelitian ini menginvestigasi tantangan yang menghalangi keberhasilan wirausaha dengan disabilitas fisik di kotapraja Sebokeng, Afrika Selatan. Metode yang digunakan meliputi wawancara semi terstruktur, focus group, dan observasi untuk mengumpulkan data kualitatif. Hasilnya mengidentifikasi beberapa hambatan utama, seperti kurangnya pendidikan dan pelatihan, akses terbatas terhadap pendanaan, dukungan pemerintah yang minim, dan kekurangan peralatan. Meskipun memiliki kesamaan dalam fokus pemberdayaan wirausaha dengan disabilitas, penelitian ini berbeda karena secara khusus mengeksplorasi hambatan-hambatan yang dihadapi di Kotapraja Sebokeng. (Maziriri & Madinga, 2016)
21.	Management Development	(2017)	Barriers To Entrepreneurship Confronted By Persons With Disabilities: An Exploratory Study On Entrepreneurs With Disabilities In Bangladesh	Saptarshi Dhar dan Tahira Farzana	Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman dan perspektif pengusaha penyandang disabilitas di Bangladesh. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan kuesioner semi terstruktur. Hasilnya menunjukkan bahwa para pengusaha tersebut menghadapi kesulitan dalam mengelola modal kerja, memiliki pengetahuan bisnis yang terbatas, serta menghadapi kendala akses informasi, pelatihan, dan mobilitas operasional. Penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya dalam fokus pada kewirausahaan penyandang disabilitas, namun berbeda karena menyoroti hambatan yang spesifik dialami di Bangladesh. (Dhar & Farzana, 2017).

**Tabel 1 - Studi Terdahulu Tentang Pemberdayaan Difabel Melalui UMKM**



## **F. Dasar Teori**

### **1. Peran**

Menurut Robert Linton dalam Aco Musaddad (2018) Ia adalah seorang antropolog yang mendirikan teori peran, yang menyatakan bahwa peran mewakili interaksi dalam lingkungan sosial dan dapat didefinisikan sebagai sekelompok aktor yang melakukan bagian-bagiannya berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam budaya. Harapan peran adalah pemahaman bersama yang memandu bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut gagasan ini, orang-orang yang menduduki posisi tertentu diharapkan berperilaku sesuai dengan peran mereka. Ketika seseorang atau organisasi menjalankan hak dan kewajibannya, maka mereka sedang memenuhi suatu peran (Mussadad, 2018). Menurut Edy Suhardono, pengertian atau pengertian peran adalah fungsi yang dilakukan oleh seseorang selama menduduki tempat dalam sistem sosial (Suhardono, 2016)..

Menurut Biddle dan Thomas dalam Aco Musaddad (Mussadad, 2018) teori peran diklasifikasikan ke dalam empat golongan yaitu :

- 1) Sekelompok individu yang berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosialnya.
- 2) Perilaku yang berkembang sepanjang proses penugasan.
- 3) Keadaan perilaku orang tersebut saat ini.
- 4) Hubungan antara individu dan perilaku

Menurut Jam Ife dan Frank Tesoriero terdapat berbagai indikator peran yang harus dimiliki oleh suatu kelompok atau orang agar proses pencapaian tujuan organisasi tetap berjalan pada jalurnya. Indikasi perannya antara lain: (Ife & Tesoriero, 2016) :

a) Peran fasilitatif

Tugasnya memfasilitasi kelompok masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, serta mendorong dan mendukung kelompok masyarakat tertentu..

b) Peran edukasional

Peran dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang fokus pada pemberian umpan balik guna mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pelatihan, dan pengalaman sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat.

c) Peran representatif

Peran representatif mengacu pada interaksi dengan badan atau lembaga di masyarakat yang memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas, seperti memperoleh bantuan modal usaha dari sumber luar, membela penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi, dan memperkenalkan hasil produksi melalui media massa untuk menarik perhatian pihak luar. Para Pihak. Mendukung program yang telah dijalankan.

d) Peran teknis

Peran teknis berfokus pada kompetensi seseorang atau kelompok untuk menjalankan posisinya, seperti pengumpulan dan analisis data, kemahiran dalam mengoperasikan komputer, dan kemampuan merencanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan.

## 2. Peranan Pemerintah

Secara umum, peran diartikan sebagai kehadiran dalam menentukan suatu proses yang berkelanjutan.. Sementara itu, Alvin L. Bertrand (1980) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu..

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet (1985), yang mengartikan peran sebagai perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tempat dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S Susanto (1979) berpendapat bahwa peran bersifat dinamis dan bukan kaku, didasarkan pada pihak-pihak dan tugas, atau bersifat subjektif.

Peran merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menunaikan kewajibannya. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung, artinya tidak ada peran tanpa status, dan tidak ada status tanpa peran. Sebuah peran setidaknya terdiri dari tiga hal, yaitu:

- a. Peran mencakup aturan-aturan yang mengatur kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat.

- b. Peran adalah gagasan yang menggambarkan apa yang mungkin dilakukan individu dalam masyarakat.
- c. Peran dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang penting bagi kerangka sosial masyarakat.

Peran dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang karena fungsi peran adalah sebagai berikut::

- a. Memfasilitasi sosialisasi
- b. Mewariskan tradisi, kepercayaan, nilai, adat istiadat, dan pengetahuan
- c. Menumbuhkan kesatuan masyarakat.
- d. Menghidupkan sistem kendali dan kendali sehingga dapat menyelamatkan nyawa masyarakat.

Tanggung jawab sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan cara pelaksanaannya:

- a. Peran yang diharapkan: cara optimal untuk menjalankan peran seperti yang dilihat oleh masyarakat. Masyarakat mengharapkan pekerjaan yang diharapkan dilaksanakan dengan hati-hati, dan tugas ini tidak dapat ditawar-tawar dan harus dilaksanakan persis seperti yang ditetapkan. Kategori ini mencakup peran-peran seperti hakim dan protokol diplomatik, dan lain-lain.
- b. Peran yang diadaptasi (peran nyata), yaitu menggambarkan bagaimana peran tersebut dijalankan. Penerapan posisi ini lebih mudah disesuaikan dengan skenario dan setting tertentu. Perubahan peran tersebut

mungkin tidak sesuai dengan konteks lokal; Meski demikian, kekurangan yang terjadi mungkin dianggap wajar oleh masyarakat. (Narwoko & Suyanto, 2007).

Dalam (Raho, 2007) menurut Merton, peran adalah suatu pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang-orang yang mempunyai kedudukan tertentu. Kumpulan peran dikenal sebagai kumpulan peran. Jadi, rangkaian peran adalah totalitas interaksi berdasarkan peran yang dimiliki orang-orang karena mereka memegang posisi sosial yang unik..

David Berry (2003) menunjukkan bahwa dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang dituntut untuk memenuhi tanggung jawabnya. Peran digambarkan sebagai serangkaian harapan yang ditempatkan pada orang-orang yang memegang posisi sosial tertentu. Posisi diatur oleh standar masyarakat, artinya kita diharuskan melakukan tindakan tertentu di tempat kerja, di rumah, dan di posisi lain.

Lebih lanjut disebutkan bahwa ada dua macam harapan dalam suatu peran, yaitu: pertama, harapan masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban pemegang peran, dan kedua, harapan yang dimiliki pemegang peran terhadap masyarakat atau orang-orang yang terkait dengannya dalam menjalankan peran. peran atau kewajibannya. Menurut David Berry, peran adalah bagian dari struktur masyarakat, dan struktur

masyarakat dapat dianggap sebagai pola peran yang saling terkait (Kaghoo, 2010).

Menurut teori peran, yang mempelajari hubungan antarmanusia, terdapat skenario atau peran yang disediakan oleh masyarakat yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam interaksinya..

Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan politik antar negara atau dalam komunitas internasional, sebagaimana dibuktikan oleh teori peran yang didasarkan pada analisis politik. Teori John Wahlke tentang teori peran memiliki dua penerapan dalam analisis politik. Ia membagi peran berdasarkan aktor yang memerankannya, yaitu antara aktor politik dan lembaga atau lembaga. Ia menunjukkan bahwa aktor-aktor politik biasanya berusaha menyesuaikan tindakan mereka dengan norma-norma posisi yang mereka mainkan. Sementara itu, ia membahas peran institusi dari segi perilaku, dengan menggunakan model teori peran untuk menggambarkan elemen perilaku yang membedakan suatu aktivitas sebagai institusi. Paradigma teori peran juga melihat orang-orang bergantung dan bereaksi terhadap tindakan orang lain. (*iwansmile*, 2009).

Stryker mengembangkan teori peran berdasarkan gagasan luas berikut.:

- a. Tindakan manusia (aktor) bergantung pada dunia yang diberi nama dan diklasifikasikan; melalui interaksi dengan orang lain, aktor belajar bagaimana berperilaku di dunia.

- b. Aktor mempelajari simbol-simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi status sosial dalam kaitannya dengan struktur sosial yang relatif stabil, namun “peran” penting adalah perilaku umum yang dikaitkan dengan posisi sosial..
- c. Struktur sosial berskala luas (pola perilaku terstruktur) memainkan peran utama. Struktur sosial memberikan kerangka di mana para pemain berperilaku.
- d. Ketika aktor bertindak dalam suatu sistem sosial, mereka berperilaku dan menempatkan diri sesuai dengan itu.
- e. Ketika aktor terlibat, dia menggunakan nama untuk menggambarkan situasi, pemain, dirinya sendiri, serta fitur dan peristiwa unik. Analisis situasional ini kemudian digunakan untuk merencanakan tindakannya sendiri..
- f. Makna sosial tidak menentukan perilaku sosial, meskipun bersifat memaksa. Yang berlaku adalah hipotesis pembuatan peran, yang menyatakan bahwa para pelaku berpikir secara aktif dan kreatif tentang peran mereka dibandingkan hanya menerimanya.
- g. Struktur sosial membatasi tingkat pengembangan suatu posisi, oleh karena itu menerimanya saja tidak cukup. Ada 28 lembaga masyarakat tertentu yang mendampingi pelaku agar lebih kreatif, namun ada juga yang sebaliknya. (Puady, 2011).

Selanjutnya istilah “pemerintahan” berasal dari kata “governor” yang diambil dari bahasa Yunani steering-steersman (orang yang

mengarahkan), sehingga secara umum pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut pemerintah. lembaga yang mengarahkan kehidupan masyarakat. Ada pula yang berpendapat bahwa pemerintah berasal dari kata Perancis “gouvernance” (pejabat kerajaan), yang pertama kali muncul pada abad ke-14 untuk menyebut pejabat yang setia, oleh karena itu pemerintah juga dapat dibaca sebagai pejabat yang menjalankan tanggung jawabnya dengan loyal.

Lebih mendasar lagi, pemerintah adalah suatu entitas yang didirikan untuk memenuhi tujuan masyarakat suatu negara, membuat dan menegakkan pilihan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah mempunyai mandat otoritatif untuk menggunakan sumber daya yang tersedia bagi masyarakat untuk mencapai tujuan ini. Pemerintah bisa melakukan eksplorasi pertambangan atau meminta pihak lain melakukan eksplorasi, menetapkan tarif, membuat aturan, melarang individu melakukan aktivitas tertentu, dan lain sebagainya guna mencapai kehidupan bermasyarakat yang diinginkan. Oleh karena itu, perbedaan nyata antara pemerintah dan lembaga lainnya adalah bahwa dalam konteks interaksi sosial, pemerintah mempunyai legitimasi otoritas koersif, yang disebut Huges sebagai “the power of coercion”, namun pola interaksinya berbeda. institusi bersifat sukarela. “kekuasaan yang memaksa” ini berasal dari legitimasi hukum pemerintah untuk bertindak atas nama negara dalam rangka menjaga dan menjamin kepentingan masyarakat sekaligus mencapai tujuan. (Setiyono, 2014).



The World Bank, pada laporan tentang pembangunan menyebutkan bahwa pemerintah memiliki lima “Fundamental Tasks” yakni; (1) meletakkan dasar-dasar hukum (establishing a foundation of law), (2) mengadakan kebijakan yang kukuh tidak menyimpang, termasuk stabilitas makro ekonomi (maintaining a nondistortionary policyenvironment, including macroeconomic stability); (3) melakukan investasi dibidang pelayanan sosial dasar dan infrastruktur (investing in basic social services dan infrastructure); (4) melindungi yang lemah (protecting vulnerable); dan (5) melindungi lingkungan hidup (protecting the environment).

Menurut Anderson didalam buku Budi Setiyono (2014), Salah satu tugas utama pemerintah adalah menyelesaikan dan memperbaiki perselisihan di antara anggota masyarakat. Pemerintah dan negara pada dasarnya didirikan untuk memecah belah atau menyelesaikan perselisihan dan perpecahan masyarakat demi mencapai keadilan, ketertiban, dan stabilitas. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu melindungi individu-individu yang berada dalam kondisi perekonomian yang buruk dari keserakahan mereka yang berada dalam kondisi perekonomian yang lebih baik.

### 3. Pemberdayaan

#### a. Definisi Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan berasal dari kata ‘power’

(kekuasaan atau pemberdayaan). Pemberdayaan sebagai sebuah proses transformasi menjadi sebuah istilah yang signifikan. Dengan kata lain, kelangsungan proses pemberdayaan bergantung pada dua faktor: (pertama) kemampuan kekuasaan untuk berubah. Pemberdayaan tidak mungkin terjadi jika kekuasaan tidak berubah. (Kedua), kekuatannya bisa ditingkatkan. Ide ini menyoroati gagasan kekuasaan sebagai sesuatu yang dinamis, bukan statis. (Suharto, 2017).

Pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mempunyai kebebasan, dalam arti tidak hanya bebas berpendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan bebas dari kesakitan; (b) mengakses sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan..

Menurut Ife (1995: 61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Menurut Parsons (1994) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah proses dimana masyarakat memperoleh kekuatan untuk berpartisipasi, mengendalikan, dan mempengaruhi peristiwa dan lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan menekankan bahwa masyarakat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan

kemampuan yang diperlukan untuk mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang-orang yang mereka sayangi.

Sedangkan menurut Swift dan Levin (1987) menjelaskan bahwa pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu proses perubahan yang terkait erat dengan konsep kekuasaan yang dinamis. Dua aspek penting dalam pemberdayaan adalah kemampuan kekuasaan untuk berubah dan diperluas. Dalam konteks ini, pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok yang rentan, memberikan kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengakses sumber-sumber produktif, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan juga diarahkan pada upaya untuk memberikan kekuatan kepada individu yang lemah atau tidak beruntung sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Suharto, 2017). Dengan demikian, pemberdayaan melibatkan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan sendiri dan orang lain, serta pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

b. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan bertujuan untuk memperkuat masyarakat yang lemah tanpa pengaruh eksternal atau internal. (Suharto, 2017). Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu (Sumaryadi, 2005):

- 1) Pembangunan dapat membantu masyarakat yang lemah, kecil, tertindas, dan miskin, seperti masyarakat miskin perkotaan, buruh tani, petani kecil, kelompok masyarakat adat yang belum berkembang, generasi muda pencari kerja, penyandang disabilitas, dan sebagainya
- 2) Kelompok masyarakat dapat diberdayakan secara sosial ekonomi sehingga dapat hidup mandiri, mencukupi kebutuhan hidup, dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan memiliki tujuan utama diantaranya membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat agar maju kearah yang baik secara kontinu (Machendrawaty & Safei, 2001). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memperluas pilihan masyarakat. Masyarakat akan memilih dan mempersepsikan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, sehingga setiap upaya pemberdayaan masyarakat Waji akan berusaha meningkatkan harkat dan martabat manusia serta membantu mereka menjadi peradaban yang lebih canggih dalam berbagai aspek kehidupan.(Syafe'i, 2001).

c. Tahap Pemberdayaan

Terdapat tujuh tahap pemberdayaan yang terdapat di masyarakat yaitu (Adi, 2003):

1) Tahap Pesiapan

Prosedur persiapannya dipisahkan menjadi dua bagian: pertama, penyimpanan petugas. Petugas penyimpanan memahami konsep pemberdayaan masyarakat seperti yang didefinisikan oleh pekerja komunitas. Kedua bidang penyimpanan diproses dalam mode non-direktif..

2) Tahap Pengkajian

Tahapan ini dilakukan baik secara kolektif maupun individual dalam masyarakat. Petugas harus bekerja untuk menemukan kebutuhan dan sumber daya masyarakat..

3) Tahap Perencanaan Alternatif

Kegiatan atau program. Langkah ini dilakukan dengan mengikutsertakan aparat di tengah masyarakat dalam memikirkan cara mengatasi kesulitan yang dihadapi..

4) Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Tahapan ini dilakukan dengan menawarkan bantuan kepada kelompok oleh agen dalam mengidentifikasi dan mempersiapkan program yang akan dilakukan di masa depan sebagai bentuk penyelesaian masalah..

5) Tahap Pelaksanaan

Program pemberdayaan masyarakat akan terlaksana apabila terdapat peran masyarakat yang diharapkan dapat mengembangkan program yang telah dirancang..

#### 6) Tahap Evaluasi

Tahapan ini dilakukan oleh petugas dan masyarakat dalam mengawasi program pemberdayaan yang dilaksanakan, dimana program ini harus melibatkan masyarakat. Kehadiran masyarakat dimaksudkan untuk membangun sistem pengawasan yang relatif cepat dan meningkatkan hubungan komunikasi jangka panjang dalam pemanfaatan sumber daya alam.

#### 7) Tahap Terminasi

Tahapan ini dilakukan dengan cara memutuskan hubungan kerja dengan masyarakat berdaya secara formal, oleh karena itu program dihentikan..

Sumohadiningrat (1997) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga langkah, yaitu:

- a) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan masyarakat.
- b) Penguatan potensi masyarakat.
- c) Istilah memberdayakan artinya mengatasi..
- d. Indikator Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki tiga dimensi: kompetensi masyarakat, keterlibatan sosial politik, dan partisipasi. Ada tiga penanda pemberdayaan yang menghasilkan (Suharto, 2017):

- 1) Tindakan konstruktif yang berasal dari pertumbuhan pribadi dan berkembang menjadi transformasi signifikan.

- 2) Keadaan psikologis ditandai dengan terbentuknya rasa percaya diri yang efektif dalam meyakinkan orang lain.
- 3) Pembebasan melalui terobosan sosial yang muncul dari radikalisasi dan pendidikan masyarakat proletariat, yang setelahnya masyarakat proletar secara bersama-sama berupaya untuk memenangkan kekuasaan dan mereformasi pembatasan yang menindasnya.

#### 4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

##### a. Pengertian UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikan usaha kecil. Usaha kecil adalah suatu usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang memiliki, menguasai, atau terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu usaha menengah atau besar yang sesuai dengan bidangnya. kriteria bisnis. kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. (Tambunan, 2012).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah istilah yang merujuk pada sektor usaha yang melibatkan bisnis dengan skala kecil hingga menengah. UMKM mencakup beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan-perusahaan mikro yang dijalankan oleh individu atau keluarga hingga perusahaan kecil dan menengah yang mungkin

memiliki lebih banyak karyawan. Karakteristik utama dari UMKM adalah skala usaha yang terbatas, jumlah karyawan yang relatif kecil, serta kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi lokal dan nasional,

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi faktor utama bagi masyarakat karena mampu memberikan pendapatan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dan mampu berperan aktif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Selain itu, usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga merupakan sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi pelaku bisnis yang bergerak dalam berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Secara ekonomi, pelaku UMKM memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa dalam arti memberikan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja.

b. Tujuan UMKM

Tujuan usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah menumbuh kembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Ini memiliki arti bahwa usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan sebuah usaha dalam perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi



yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan (Alansori & Listyaningsih, 2020).

c. Karakteristik UMKM

Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari usaha besar, antara lain:

- 1) Kualitas komoditas belum terstandarisasi, karena sebagian besar UMKM kurang memiliki kemampuan teknologi yang diperlukan. Barang-barang yang dibuat adalah buatan tangan, sehingga persyaratan kualitasnya berbeda..
- 2) Desain produk terkendala karena kurangnya informasi dan keahlian terhadap produk. Sebagian besar UMKM bekerja berdasarkan pesanan; hanya sedikit yang berani menciptakan konsep segar.
- 3) Keterbatasan variasi produk karena UMKM hanya memproduksi beberapa jenis barang saja. Permintaan model baru sulit dipenuhi oleh UMKM, dan walaupun diterima, proses pengerjaannya akan memakan waktu lama. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas sehingga konsumen kesulitan.
- 4) Bahan baku kurang terstandar karena berasal dari berbagai sumber.

5) Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang baik, karena pembuatannya belum teratur dan barang yang dihasilkan sering apa adanya..

## 5. Disabilitas

### a. Pengertian Disabilitas

Disabilitas diambil dari bahasa Inggris, “disability” yang mempunyai arti ketidakdayaan yang muncul sejak lahir didunia biasa dinamakan dengan “cacat permanen” (Chodzirin, 2013). Istilah cacat, difabel maupun disabilitas semuanya mengandung arti yang sama, namun secara psikologis dapat diterima oleh individu penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan situasi sosial dimana mereka akan berkarakteristik diskriminatif dan tidak adil. Istilah “penyandang disabilitas” awalnya digunakan, namun Kementerian Sosial RI dan Komnas HAM mengakui bahwa istilah tersebut memiliki makna yang kasar dan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia serta bertentangan dengan nilai-nilai leluhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. (Mulyati et al., 2019).

Menurut undang-undang mengenai penyandang disabilitas, kata disabilitas mengacu pada mereka yang memiliki keterbatasan sensorik, intelektual, mental, atau fisik jangka panjang atau permanen dan memiliki tantangan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Pawestri, 2017).

Akademisi dan warga negara menggunakan istilah disabilitas untuk merujuk pada penyandang disabilitas. Diantaranya adalah penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus. (Amalia, 2016). Penggunaan bahasa sangat penting agar tidak menyinggung penyandang disabilitas..

Tentu saja, frase ideal ditentukan pada handicap tertentu. Misalnya, pluralitas dalam bahasa ketika kata-kata dianggap alami, baik hati, atau sopan adalah istilah-istilah yang dianggap dapat dibandingkan oleh orang lain (Coleridge, 1997). Individu tunarungu, misalnya, tidak ingin disebut tunarungu; mereka percaya bahwa istilah tunarungu memiliki konotasi kepedulian dan mereka senang disebut demikian. Jadi, masyarakat harus paham bagaimana cara menyajikannya dengan baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain..

b. Ragam Penyandang Disabilitas

Berdasarkan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* ragam penyandang disabilitas dibagi menjadi 4 yaitu disabilitas fisik, sensorik, intelektual dan mental. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kelainan jasmani adalah keadaan yang mempengaruhi satu atau lebih organ tubuh seseorang sehingga menimbulkan kesulitan. Anomali fisik ini dibagi menjadi beberapa kelompok. (Pawestri, 2017). Sebagai berikut:

- a) Amputasi

- b) Lumpuh layuh
  - c) Paraplegia
  - d) Cerebral Palsy
  - e) Akibat stroke
  - f) Kusta
  - g) Orang kecil
- 2) Disabilitas Sensorik yaitu seseorang yang kehilangan kemampuan menggunakan panca inderanya misalnya:
- a) Tuna netra atau kecacatan pada penglihatan, tuna netra merupakan suatu kondisi mata yang menyebabkan seseorang tidak dapat melihat sama sekali meskipun menggunakan kacamata. Namun, dalam tugas sehari-hari, penyandang tunanetra ditopang dengan tongkat..
  - b) Tuna rungu adalah kerusakan telinga yang terjadi ketika seseorang tidak menggunakan teknologi bantu dan tidak dapat mendengar apa pun pada jarak lebih dari satu meter.
  - c) Tuna wicara merupakan seseorang yang mengalami kerusakan atau kehilangan kemampuan berbahasa dalam mengucapkan kata dan penciptaan bunyi..
  - d) Bisu-tuli merupakan campuran tuna rungu dan tuna wicara. Seseorang yang menderita ketulian kehilangan kemampuan untuk merasakan bunyi-bunyian atau bunyi-bunyian, sehingga

orang tersebut mengalami kesulitan dalam mengucapkan hal-hal yang dipelajari melalui pendengaran..

- 3) Penyandang disabilitas intelektual adalah gangguan fungsi kognitif yang disebabkan oleh tingkat kecerdasan yang lebih rendah dari biasanya. Penyandang disabilitas intelektual dibagi menjadi beberapa kategori, sebagai berikut::
  - a) Tunagrahita merupakan seseorang yang mengalami hambatan dalam perkembangan mental intelektual yang jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam akademik, komunikasi dan sosial.
  - b) Anak yang terlambat berbicara merupakan anak yang mempunyai potensi intelektual yang sedikit dibawah anak normal akan tetapi belum masuk dalam tunagrahita.
  - c) Kesulitan belajar khusus, anak yang secara nyaa mengalami kesulitan dalam bidang akademik khusus terutama dalam hal kemampuan membaca dan menulis dan berhitung.
  - d) Anak berbakat merupakan anak yang mempunyai bakat kemampuan atau kecerdasan yang luar biasa yaitu anak yang mempunyai potensi intelektual, kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas diatas anak-anak seusianya.
  - e) Indigo, adalah seseorang yang sejak lahir memiliki kelebihan luar biasa yang tidak dimiliki manusia lainnya.

- 4) Gangguan jiwa merupakan terganggunya fungsi kognitif dan emosional seseorang. Secara keseluruhan, kategorisasinya adalah sebagai berikut::
- a) Autism, merupakan suatu kondisi tumbuh kembang anak yang ditandai dengan adanya permasalahan pada sistem saraf pusat yang berujung pada terganggunya interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku..
  - b) Disabilitas ganda, adalah seseorang yang menderita atau mempunyai lebih dari satu keterbatasan atau pengecualian, seperti seseorang yang mengalami kebutaan dan gangguan bicara pada saat yang bersamaan atau cacat fisik dan intelektual pada saat yang bersamaan..

### **G. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel sebagai berikut:

#### **1. Peranan Pemerintah**

Peran pemerintah adalah keterlibatan dan tanggung jawab entitas pemerintah dalam mengelola, mengatur, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan serta kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2. Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah suatu proses atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri individu atau kelompok, sehingga mampu mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan, mengatasi permasalahan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri.

### 3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah kategori usaha yang memiliki skala kecil dan menengah, umumnya terdiri dari usaha mikro dengan modal terbatas, usaha kecil yang sudah berkembang sedikit lebih besar, serta usaha menengah yang memiliki skala yang lebih besar namun masih bersifat independent.

### 4. Disabilitas

Disabilitas adalah kondisi atau keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari seseorang, berpotensi membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

## **H. Definisi Operasional**

1. Peranan Pemerintah dalam konteks ini didefinisikan sebagai tindakan, kebijakan, dan dukungan yang diberikan oleh entitas pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Blora, untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM Difabel Batik Mustika. Adapun Indikator dalam penelitian ini anatar lain sebagai berikut:

a. Peran fasilitatif

- 1) Pemberian pelayanan publik seperti dalam memberikan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan
- 2) Pemberian pelatihan keterampilan sesuai dengan potensi yang dimiliki

b. Peran edukasional

- 1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota difabel blora mustika
- 2) Meningkatkan kesadaran melalui kegiatan pelatihan serta memberikan dorongan dan motivasi kepada anggota difabel blora mustika

c. Peran representatif

- 1) Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan potensi.
- 2) Melakukan promosi sebagai kelanjutan pemberian pelatihan. Membuka jaringan kerja dengan pihak lain bagi masyarakat disabilitas.
- 3) Mendapatkan sumber bantuan dari instansi lain seperti bantuan modal pelatihan

d. Peran teknis

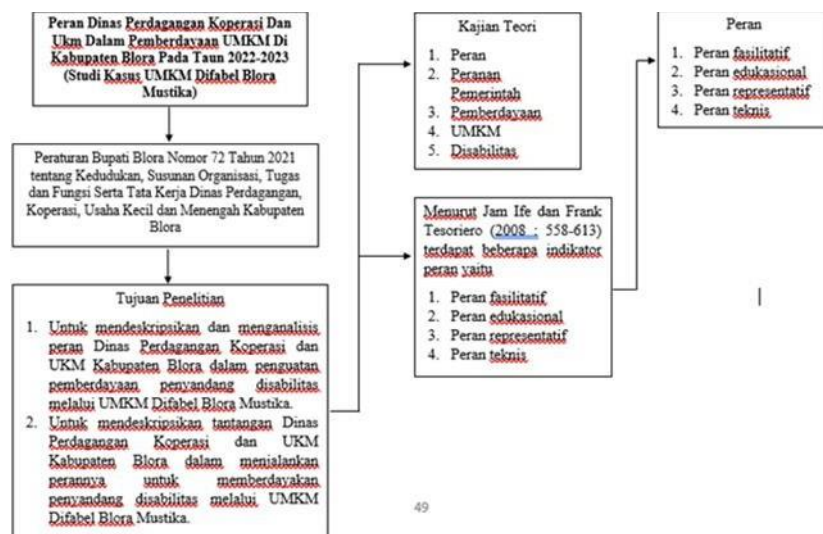
- 1) Kemampuan pegawai dalam menginput dan menganalisis data.
- 2) Pemberian pelatihan kepada pegawai



2. Pemberdayaan adalah suatu proses atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat atau kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan serta peningkatan akses terhadap sumber daya dan peluang. Adapun indikator dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
  - a. Pelatihan Keterampilan
  - b. Pemasaran
3. Disabilitas adalah kondisi fungsional yang membatasi atau menghambat kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri.
  - a. Jenis Disabilitas
  - b. Kemampuan keterampilan dan pelatihan
  - c. Kemandirian ekonomi

#### **I. Kerangka Berfikir**

Menurut Sugiyono (2013), kerangka berfikir adalah model konseptual yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar hal yang akan diteliti. Berdasarkan hasil studi pendahuluan sebagaimana yang diuraikan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah serta memperhatikan teori dan konsep yang mendukung, maka dapat diungkapkan kerangka teori berfikir penelitian yang menggambarkan penelitian yang akan dilaksanakan.



Gambar 1 - Kerangka Berpikir

## J. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara wawancara, angket, observasi dan dokumentasi, analisis bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Peneliti juga menggunakan catatan lapangan berupa catatan observasi dan sumber lain. Penelitian ini akan

mendeskripsikan dan menganalisis pada pemberdayaan UMKM penyandang disabilitas melalui keterampilan membuat.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari individu dan perilaku yang diamati, serta menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai melalui model statistik. (Moelong, 2007).

Para peneliti menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif ini menghasilkan teknik analisis yang tidak mencakup analisis statis atau metodologi kuantitatif lainnya. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata dan gambar, bukan angka. (Moelong, 2007). Di dalam penelitian kualitatif, terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan naratif, fenomenologis, grounded theory, etnografis, dan studi kasus.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis studi kasus instrumental tunggal (single instrumental case). Pendekatan studi kasus adalah penelitian yang mengkaji satu kasus atau lebih maupun sebuah keputusan atau lebih dalam realitas yang aktual untuk tujuan tertentu dengan data yang dikumpulkan secara mendalam dan rinci dari berbagai sumber melalui kegiatan observasi, wawancara, dokumen dan laporan-laporan. Kemudian, jenis single instrumental case berarti bahwa studi hanya berfokus untuk menganalisa satu kasus saja.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dengan subjek penelitian yaitu Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora. Lokasi penelitian di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Blora dipilih karena menjadi pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan UMKM, termasuk UMKM yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Melalui lokasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi secara langsung upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM difabel. Ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam usaha mereka serta efektivitas program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Blora.

## 3. Jenis Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling, yaitu metode sampel yang memastikan peneliti menentukan pihak yang cocok dengan tujuan penelitian sehingga bisa diharapkan untuk menanggapi dan memberikan informasi tentang kasus yang diteliti

### a. Data Primer

Data primer yang sering disebut dengan data tangan pertama adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. (Yusuf, 2014).

Data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh individu yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya. Data primer dapat dikumpulkan dari sumber informan, yaitu orang atau hasil wawancara penelitian. Kumpulan data inti ini terdiri dari catatan hasil, wawancara, temuan observasi lapangan, dan data informan. Data diperoleh secara langsung dari subyek penelitian yaitu pegawai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber selain subjek penelitian itu sendiri. Informasi tersebut diperoleh dari catatan perpustakaan atau buku-buku yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi, buku-buku, jurnal-jurnal dan data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2001). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari segala hal yang berkaitan tentang DBM berupa foto pendukung, dokumen, website, dan literature-literatur buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

<b>Jenis Data</b>	<b>Bentuk</b>	<b>Sumber</b>
Data Primer	<p>Wawancara terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora</li> <li>2. Menggunakan teori peran Jam Ife dan Frank Tesoriero (2008:558-613) terdapat beberapa indikator peran yaitu fasilitatif, edukasional, representatif dan teknis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Koperasi UKM Kabupaten Blora</li> <li>2. Subkor Binas Koperasi</li> <li>3. Analis Kebijakan</li> <li>4. Anggota UMKM Difabel Blora Mustika (Project Officer)</li> <li>5. Anggota Difabel Blora Mustika (Staff UMKM Difabel Blora mustika)</li> </ol>
Data Sekunder	Peta wilayah Kabupaten Blora	Dokumen RPJMD 2021-2026
	Struktur Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora	Dokumen Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora
	Struktur Bidang Koperasi Kabupaten Blora	Dokumen Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora
	Visi dan Misi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora	Website resmi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora ( <a href="https://dindagkopukm.blorakab.go.id">https://dindagkopukm.blorakab.go.id</a> )
	Struktur UMKM Difabel Blora Mustika	Dokumen UMKM Difabel Blora Mustika
	Visi dan Misi UMKM Difabel Blora Mustika	Dokumen UMKM Difabel Blora Mustika
	Data Anggota Difabel Blora Mustika	Dokumen UMKM Difabel Blora Mustika

**Tabel 2 - Rincian Jenis Data**

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan data adalah salah satu faktor paling penting untuk dipertimbangkan saat melakukan penelitian untuk memastikan penelitian berjalan lancar dan efisien. Prosedur pengumpulan data juga ditentukan untuk mengurangi hambatan dan kesalahan dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, informasi, dan fakta pendukung di lapangan untuk tujuan penelitian. Tentu saja pendekatan penelitian peneliti menentukan metodologi pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, penulis akan menggunakan prosedur berikut:

##### a. Observasi

Observasi lebih dari sekedar teknik pengumpulan data; mengacu pada upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dan memaksimalkan pengamatan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non participatory observer yaitu bentuk observasi dimana peneliti tidak terlibat atau ikut dalam orang yang di observasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung kelapangan.

##### b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diselidiki, serta ketika

peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang responden dan jumlah responden yang minim. Wawancara dilakukan bersama dengan subyek penelitian yaitu Kepala Bidang Koperasi UKM Kabupaten Blora, Kepala Seksi UKM Bidang Koperasi, Analis Kebijakan, dan Anggota Difabel Blora Mustika.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau kreasi kolosal yang dibuat oleh orang lain. Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi terhadap objek atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi, rapat, agenda, dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah pengumpulan data secara metodelis yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dengan lebih mudah. Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah tindakan mencari secara cermat dan menggabungkan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan kesimpulannya dapat disebarluaskan. (Sugiyono, 2013). Inductive data analysis is an analysis based on the data that is collected.

Menurut Miles & Huberman (1992) Analisis terdiri dari tiga tugas berbeda: pengumpulan data, pemrosesan data, dan verifikasi.



## 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Peneliti mengantisipasi reduksi data sambil memutuskan kerangka konseptual topik penelitian, tantangan penelitian, dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Selama pengumpulan data, terjadi tahap reduksi sebagai berikut. Proses reduksi/transformasi data ini berlanjut setelah penelitian lapangan, hingga dihasilkan laporan akhir yang komprehensif. Reduksi data merupakan salah satu komponen analisis.

Reduksi data merupakan suatu jenis analisis yang mempertajam, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak relevan, dan mengorganisasikan data sehingga dapat dicapai temuan akhir dan divalidasi. Reduksi data tidak memerlukan peneliti untuk menafsirkannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat direduksi dan diubah dengan berbagai cara, termasuk seleksi yang ketat, ringkasan atau deskripsi singkat, pengelompokan ke dalam pola yang lebih besar, dan sebagainya. Tidak selalu disarankan untuk menerjemahkan fakta menjadi angka atau peringkat..

## 2. Penyajian Data

Miles dan Huberman menggambarkan presentasi sebagai kumpulan informasi terorganisir yang memungkinkan potensi pembentukan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan, menurut Miles dan Huberman, hanyalah salah satu aspek dari pengaturan yang komprehensif. Sepanjang penelitian, kesimpulan juga dikonfirmasi. Verifikasinya mungkin secepat pemikiran ulang yang terlintas dalam benak analis saat ia menulis, peninjauan catatan lapangan, atau sama ekstensif dan menghabiskan banyak energi seperti memeriksa dan berbagi pandangan di antara kolega untuk mencapai kesepakatan intersubjektif atau aktivitas lainnya. upaya substansial untuk

menempatkan replika penemuan dalam kumpulan data yang berbeda. Ringkasnya, penafsiran yang diperoleh dari data lain harus diverifikasi kebenarannya, ketahanannya, dan penerapannya, yang disebut juga validitas. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada tahap pengumpulan data, namun perlu dikonfirmasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.